

Abstrak

Nursilowati, Dewi, 2019, Konstruksi Pemberitaan Pilpres Periode 2019-2024 (*Conversation*)

Analysis Krippendorff Pada Program Acara Pojok 7 JTV Masa Tayang April Ditinjau Dari SK KPU 1096 Tahun 2018), Skripsi, Pembimbing: Luthfi Ulfa Ni'amah, M. Kom. I.

Kata Kunci: Konstruksi Pemberitaan Media, SK KPU 1096 Tahun 2018, Akuntabilitas Publik,

JTV, dan Pojok 7.

Pemberitaan pilpres yang terjadi di media penyiaran saat ini seringkali menjadi sumber konflik pada sistem sosial sebagaimana pengamatan peneliti dari kasus pecah kongsi media penyiaran di Indonesia saat pilpres 2014 lalu. Berita yang dikemas dengan bahasa persuasif dan merendahkan pihak lawan tentu menimbulkan gesekan antar kubu pendukung paslon. Televisi yang seharusnya menjadi kontrol sosial bagi masyarakat justru sebagai pemantik konflik. Penelitian ini perlu dikaji mengingat banyaknya monopoli frekuensi siaran oleh kandidat maupun partai politik. Oleh sebab itu perlu adanya pengawasan khusus pada media penyiaran Indonesia saat pemberitaan terkait pilpres sesuai dengan ketentuan SK KPU 1096 Tahun 2018 untuk mengetahui stasiun televisi mana yang menerapkan regulasi ini dan melanggar regulasi KPU serta P3SPS yang telah ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Seiring dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat penerapan SK KPU 1096 Tahun 2018 pada stasiun televisi JTV dilihat dari program acara Pojok 7 sekaligus untuk mengetahui akuntabilitas publik yang dijaga oleh JTV melalui muatan siarannya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tipe evaluasi formatif *conversation analysis* (CA) Krippendorff yang terdiri atas lima bagian: *pause, overlaps, backchannels, conversational style, adjacency pairs*.

Hasil penelitian ini adalah tidak adanya pelanggaran SK KPU 1096 Tahun 2018 pada tayangan berita di program acara Pojok 7 hal ini dapat dilihat dari sebelas video yang telah dianalisis berdasarkan lima bagian *conversation analysis*. Konstruksi pemberitaan yang dilakukan oleh stasiun televisi JTV masuk dalam kategori aman tidak menyimpang dari P3SPS selaku tartib media penyiaran Indonesia. Akuntabilitas publik sebagai tolak ukur transparansi suatu pemberitaan juga telah dibubuhkan dalam setiap tayangan yang ada. Analisis ini sangat mendukung untuk mengkaji suatu pemberitaan politik yang penuh strategi, trik dan penggiringan opini publik melalui kata dan kalimat yang terlontar, serta ekspresi yang tersirat.

Temuan pada penelitian ini adalah tidak ditemukan iklan kampanye yang melanggar ketentuan SK KPU 1096 Tahun 2018. Empat tayangan dari sebelas tayangan yang diteliti terdapat *pause, pause* di sini menunjukkan jeda yang dibuat oleh narasumber untuk memikirkan jawaban yang tepat, sebagai tanda tidak ada

intervensi dari pihak JTV dibuktikan pada *admosound*. Sementara untuk *overlaps* terdapat dua tayangan yang bertujuan untuk melengkapi jawaban.

Disarankan untuk penelitian mendatang dapat mengembangkan model *Conversation Analysis* (CA) sebagai alat untuk menganalisa ilmu-ilmu yang berkaitan dengan politik, ilmu komunikasi, serta ilmu sosial humaniora lainnya. Dijadikan bahan acuan untuk mengkaji konflik yang timbul akibat kesalahpahaman dalam pemaknaan kata.

Abstrac

Nursilowati, Dewi, 2019, The Construction of the Newsletter for the 2019-2024 Presidential

Election (Krippendorff Conversation Analysis on JTV Program Pojok 7 aired in April reviewed From KPU decree 1096 of 2018), Thesis, Advisor: Luthfi Ulfa Ni'amah, M. Kom. I.

Keywords: Construction of Media Coverage, KPU Decree 1096 Year 2018, Public

Accountability, JTV, and Pojok 7

The news of the presidential election that occurs in broadcast media today is often a source of conflict on the social system as observed by researchers from the case of broadcast media partnerships break up in Indonesia during the 2014 presidential election. News that is packed with persuasive language and demeaning the opponents certainly creates friction between the supporters of the candidate pairs. Television, which is supposed to be a social control for the community, is becoming the trigger of conflict. This research needs to be studied considering the large number of monopoly broadcast frequencies by candidates and political parties. Therefore it is necessary to have special supervision on Indonesian broadcast media when the news related to the presidential election is in accordance with the provisions of KPU Decree 1096 of 2018 to find out which television stations apply this regulation and violate the KPU and P3SPS regulations set by the Indonesian Broadcasting Commission (KPI). Along with that, this study aims to see the application of KPU Decree 1096 of 2018 on the JTV television station seen from the Pojok 7 program and at the same time to find out about public accountability maintained by JTV through its broadcast content.

This research uses a qualitative approach with the Krippendorff type formative conversation analysis (CA) evaluation consisting of five parts: pause, overlaps, backchannels, conversational style, adjacency pairs.

The results of this study shows that there is no violation of KPU Decree 1096 of 2018 on news shows in the Pojok 7 program. This can be seen from eleven videos that have been analyzed based on the five conversation analysis sections. The construction of news carried out by the JTV television station is in the safe category and did not deviate from the P3SPS as the Indonesian broadcast media tycoon. Public accountability as a benchmark for transparency of a report has also been added to every shows that exists. This analysis is very supportive for reviewing a political report that is full of strategies, tricks and appeals to public opinion through words and sentences, and implied expressions.

The findings of this study were that there were no campaign advertisements that violated the provisions of KPU Decree 1096 of 2018. Four of the eleven shows studied were pause, pause here shows the time interval made by the informant to think of the right answer, as a sign of no intervention from the parties JTV is proven

on admosound. While for overlaps there are two shows that intended to complete the answer.

Researcher suggested that future researcher can develop a Conversation Analysis (CA) model as a tool for analyzing the sciences related to politics, communication science, and other social science. This research can be used as a reference material to examine conflicts arising from misunderstandings in the meaning of words.